



**PENGATURAN DALAM KATERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh: MUHAMMAD NAFI'UN NAJA

NIM 11000119140239

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGATURAN DALAM KATERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana (S1)
Hukum

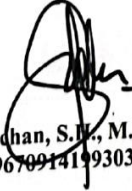
Oleh :

MUHAMMAD NAF'UN NAJA

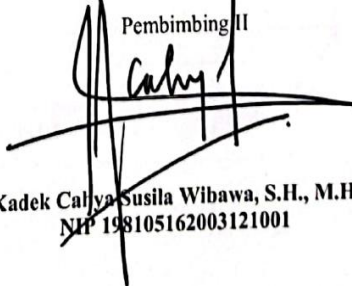
NIM 11000119140239

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I


Soledhan, S.H., M.H.
NIP 196709141993031002

Pembimbing II


Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.
NIP 198105162003121001

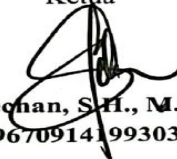
HALAMAN PENGUJIAN

**PENGATURAN DALAM KATERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Dipersiapkan dan disusun Oleh:**

**MUHAMMAD NAFI'UN NAJA
NIM 11000119140239**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2023 Dewan
Penguji

Ketua



**Solechan, S.H., M.H.
NIP 196709141993031002**

Anggota Penguji



**Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.
NIP 198105162003121001**


Anggota Penguji II



**Suhartoyo, S.H., M.H.
NIP 196605291998021001**

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002**

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan penulis didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Agustus 2023



MUHAMMAD NAFI'UN NAJA
NIM 11000119140239

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.”

(QS. Asy-Syu'ara':62)

"Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika (tertimpa musibah), serta berseru dengan seruan jahiliyah".

(HR Bukhari dan Muslim)

Penulis mempersembahkan penulisan penelitian ini untuk Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, Orang Tua penulis, kedua saudaranya, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat penulis kekuatan dan petunjuk atas karunia-nya untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berusaha keras dan berdedikasi untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan judul, **“PENGATURAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”**. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu, mendukung, memberikan bimbingan, saran, dan nasihat yang berharga selama proses penulisan. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan semangat dan moral, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi nasehat serta menuntun penulis selama berkuliah di Universitas Diponegoro Fakultas Hukum.

5. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan meberikan bimbingan dengan penuh kesabaran serta masukan, dukungan dan arahan yang bermanfaat dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini
6. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sangat sabar dalam pengerjaan Penulisan hukum ini, serta meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan, masukan, dukungan penuh, serta membagikan berbagai ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sepanjang penulisan hukum selama ini.
7. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk menguji saya dalam sidang penulisan hukum ini.
8. Bapak serta ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan juga seluruh civitas akademik serta karyawan yang sudah memberikan pengetahuan berharga kepada penulis sepanjang studinya, dan seluruh karyawan serta staf yang menopang dalam seluruh proses administrasi.
9. Teruntuk sosok yang paling berharga Abah dan Umi yaitu kedua Orang Tua Penulis, Bapak Darwanto dan Ibu Dariyanti yang telah mendidik dan memberikan segala dukungan dari berbagai arah tanpa lelah dengan penuh kesabaran dan selalu meberikan nasihat yang baik secara langsung maupun tidak

langsung bagi penulis, dan senantiasa berdoa kepada Sang Pencipta ALLAH SWT, demi kebaikan, kemudahan, kesejahteraan dan kelacaran untuk menjalani kehidupan untuk anaknya selama ini, serta senantiasa meberikan semangat tanpa henti untuk anak-anaknya yang kelak akan membahagikan keduanya.

10. Untuk Innany Mirahmatikal Maula dan Inas Widya Dramastuti selaku saudari penulis yang senantias manjadi motivasi bagi penulis untuk menjadi yang terbaik sebagai anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga.
11. Untuk Ibu Hanah dan Ibu Marni selaku kedua nenek penuli yang selalu berdoa yang terbaik untuk kesuksesan cucunya dan senantiasa meberikan uang saku tambahan kepada penulis.
12. Bapak yulistiyon, S.E. selaku Lurah Kelurahan Kramas,Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
13. Ibu Siti Aminatun R, ST. selaku Sekretaris Kelurahan Kramas,Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
14. Bapak Kamsi, S.H. selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kramas,Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
15. Mas Sigit Selaku Staf Kelurahan Kramas,Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang telah meberikan bimbingan selama saya melakukan praktek kerja lapangan.

16. Imam Rozak, Voga Rio, Ariyak, Rafly Anugrah, Ardiansyah Rizal, Abrar Zakaria, Arjuna Rafli, Akbar Ramadhan, Prihandoko, Andika Rifat, Aditya Indra, Wahyu hidayat, Andre, Nova syah, Hafid Rizky, Paundra Ardiansyah, dan Wahdi, selaku teman penulis yang menjadi tempat cerita melepas penat dalam menjalani perkuliahan.
17. Selaku teman-teman KKN Tim I Desa Pamutuh, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis selama melaksanakan KKN.

Penulis menyadari fakta bahwa penulisan hukum ini belum sempurna sepenuhnya, dan terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan yang masih tersirat. Oleh karena itu, kritik dan rekomendasi yang konstruktif sangat membantu proses penyempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan bagi siapa saja yang membacanya selama proses menulis hukum ini. Dengan cara ini, penulisan hukum ini disusun dengan harapan membantu pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 11 Agustus
2023



Muhammad Nafi'un Naja

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Metode penelitian.....	11
F. Metode pendekatan.....	12
G. Spesifikasi penelitian	12
H. Jenis data.....	12
I. Teknik Pengumpulan Data	14
J. Teknik Analisis Data.....	14
KERANGKA PEMIKIRAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengantar Tentang Keterbukaan Informasi Publik	16
B. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	25
1. Swakelola.....	30
2. Pelaksanaan Rencana Kerja	30
3. Pengadaan Bahan Jasa Lainnya, Peralatan dan Tenaga Ahli	31
4. Penyaluran dana.....	31
5. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan	32

6. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan	33
7. Laporan Realisasi Pekerjaan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	43
1. Keterbukaan informasi	43
2. Undang-Undang yang mengatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	46
B. Pengaturan keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah	52
C. Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa	55
BAB IV	59
SIMPULAN DAN SARAN.....	59
SIMPULAN	59
SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRAK

Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sangat penting. Lingkungan yang lebih transparan, peningkatan partisipasi publik, serta penegakan hukum yang tegas dapat membantu mewujudkan proses pengadaan yang adil, efisien, dan jujur. Namun informasi yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya dianggap sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik. Terutama berlaku selama proses evaluasi penyedia. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Metode analisi yang di gunakan adalah Deskriptif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara objektif.

Unsur penting dalam keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah menanggulangi berbagai masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti korupsi, diskriminasi, nepotisme, serta pemborosan anggaran. Dalam mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah penerapan peraturan perundang-undangan pada saat pembelian barang maupun jasa merupakan hal yang sangat penting demi menjamin kejujuran, efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Demi mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara pemerintahan untuk mewujudkan *Good governance*, peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus diperbarui dan dimodifikasi secara berkala. Hal ini akan mendukung dan menjaga kesopanan, kejujuran, serta kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah melakukan pembelian produk dan layanan.

Kata kunci: Pengaturan, Keterbukaan, Pengadaan, Barang, Jasa, Informasi.

ABSTRACT

Openness in the procurement of goods and services is very important. A more transparent environment, increased public participation, and strong law enforcement can help realize fair, efficient, and honest procurement processes. However, information involved in the process of procurement of government goods and services is usually considered as exempt information and cannot be accessed by the public. Especially true during the provider evaluation process. The writing of this law will discuss how to regulate public information disclosure in the payment of government goods and services. The method used in this study is a normative legal approach, normative legal research is a type of legal research that uses law as a norm system structure.

This norm system includes principles, norms, rules, agreements, doctrines, and court decisions. Research specifications are descriptive analytical, which means describing applicable laws and regulations associated with legal theories and implementation practices. The analysis method used is juridical descriptive, which is research conducted with the main aim of providing an overview or description of the situation objectively.

An important element in public information disclosure in the procurement of government goods and services is to overcome various unwanted problems such as corruption, discrimination, nepotism, and budget wastage. In regulating the disclosure of information on the procurement of government goods and services, the application of laws and regulations when purchasing goods and services is very important in order to ensure honesty, effectiveness, and accountability in the use of public funds. In order to keep up with technological advances and changes in the way governments realize good governance, regulations governing public information disclosure regarding the procurement of goods and services by the government must be updated and modified regularly. This will support and maintain public courtesy, honesty, and trust in the way the government purchases products and services.

Keywords: Regulation, Openness, Procurement, Goods, Services, Information.